

# Darurat Literasi di NTT dan Pendidikan Ala Paulo Freire sebagai Imperatif Moral Masyarakat

Samuel Delahoya <sup>a,1</sup>

Simri Risaldi Runesi <sup>b</sup>

<sup>a,b</sup> *Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga*

<sup>1</sup> [delahoyasamuel0606@gmail.com](mailto:delahoyasamuel0606@gmail.com)

## Kata Kunci:

Pendidikan Freire, Indonesia, Darurat Literasi, Pemerintah, Masyarakat,

## Abstrak

Penelitian ini mau membaca dan menganalisis konteks terjadi di Indonesia, khususnya realitas kondisi pendidikan yaitu Darurat Literasi di NTT. Ini menggambarkan bagaimana situasi pendidikan dan kebijakannya tidak berjalan dengan baik dan tepat sasaran, kompetensi pendidik yang tidak memadai dan masyarakat yang minim kesadaran sebagai imperatif moral, dirasa sebagai pemicu dampak ini. Dari sinilah, penelitian ini dibuat untuk dianalisis dengan menggunakan teori Pendidikan menurut Freire, yang menekankan pendidikan pembebasan, dialog, dan pendidikan gaya bank untuk membaca apa yang terjadi dan juga ini sebagai rujukan dalam membantu mengevaluasi, demi tercapainya pendidikan di Indonesia yang maju, dan berdaya juang. Metode yang dipakai menggunakan penelitian jenis kualitatif, dengan pendekatan studi literatur atau pustaka, yang berfokus kepada analisis dokumen, artikel, buku, dan jurnal. Untuk data penelitian sendiri menggunakan sumber artikel terpercaya. Dari sinilah, bisa disimpulkan bahwa Imperatif moral adalah pemerintah dan masyarakat, serta melalui pembacaan teori Freire, adanya ketimpangan serta ketidaksesuaian di NTT dalam memberikan pengajaran.

# The Literacy Crisis in NTT and Paulo Freire's Approach to Education as a Moral Imperative for Society

## Keywords:

*Gambling Practices, Morality, Torajan Society, Symbolic Meaning, Prophetic Church*

## Abstract

*This research aims to examine and analyze the context in Indonesia, particularly the reality of the educational situation, namely the Literacy Emergency in NTT. This illustrates how the educational situation and its policies are not running well and on target, inadequate educator competency and a society with minimal awareness of the moral imperative, are perceived as triggers for this impact. From this, this research was conducted to analyze using Freire's Educational Theory, which emphasizes liberation education, dialogue, and bank-style education to understand what is happening and also as a reference in helping evaluate, in order to achieve an advanced and empowered education in Indonesia. The method used is a qualitative research type, with a literature study approach, which focuses on the analysis of documents, articles, books, and journals. For the research data itself, trusted article sources are used. From this, it can be concluded that the moral imperative is the government and society, and through an understanding of Freire's theory, there are inequalities and inconsistencies in the delivery of education in NTT.*

## Pendahuluan

Berbicara tentang pendidikan rasanya memang menjadi suatu hal yang sangat penting, terlebih bagi sebuah negara sendiri, pendidikan menjadi satu parameter terhadap maju atau berkembangnya sebuah negara, selain ekonomi, sosial, dan politik. Bergumam soal pendidikan, secara etimologisnya, kata pendidikan berasal dari bahasa latin "*Educere*" bermakna "menarik keluar" ataupun dalam bahasa Inggris ialah "*Education*" yakni, membimbing. Bila melihat jauh kebelakang, ke abad SM, seperti pandangan para filsuf, Plato dan Aristoteles. Plato misalnya, dalam bukunya yang berjudul *Republik*, ia mengkonsepsikan tentang pendidikan sebagai upaya untuk membebaskan setiap insan pada saat itu untuk keluar dari yang disebutnya sebagai "gua kebodohan" atau lebih lengkapnya mengarah kepada konteks saat itu yakni,

pemerintah Athena yang tidak adil, ketiraniaan dalam memimpin dan menentukan perintah kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Sari Agustinani, Abdul Haris, dan Rosichin Mansur dalam tulisannya berjudul Pendidikan Menurut Perspektif Tokoh Filsuf Barat. Mereka mengatakan, Pendidikan adalah urusan yang penting bagi negara, serta itu harus menjadi tanggung jawab bagi negara untuk memberikan perkembangan dan pengajaran yang layak sedari dini, dari situlah adanya peran dalam melakukan kehidupan kemasyarakatan.<sup>2</sup> Sedangkan Aristoteles sendiri mengatakan, pendidikan adalah proses pengelompokan dan proses untuk mengumpulkan data yang memuat fakta, kemudian diteliti dengan berdasarkan kesadaran akan aturan-aturan moral, dan pungkasnya, pendidikan yang baik ialah kebahagiaan (*eudonia*) yang tertinggi.<sup>3</sup> Ini dimulai penulis yaitu dari pandangan para filsuf terhadap pentingnya pendidikan itu sendiri, penting sekali pada masa itu karena selain pendidikan adalah pengajaran, dia juga adalah tentang upaya mengajarkan berpikir kritis, dan membentuk karakter sedari dini, dan dari pengajaran-pengajaran itulah, diharapkan dapat meneliti suatu realitas, menganalisis, dan memberikan simpulan yang tentu semua berakar dari berpikir kritis.

Pendidikan di Indonesia juga memiliki filosofisnya sendiri, melihat dari kultur serta corak ragam masyarakatnya yang plural. Berangkat dari titik berangkat sebagai orang Jawa, tokoh inilah yang cikal bakal dikenal sebagai bapak pendidikan Indonesia: Ki Hajar Dewantara. Menurut Tia Basana Hutagalung dan Liesna Andriany dalam tulisannya, Slogan yang dikonsepsikan Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk mengedepankan kemerdekaan setiap insan. Dirumuskannya dalam tiga konsep.<sup>4</sup> Pertama, *Ing ngarsa sung tuladha* yang berarti “di depan” dengan makna, bahwa seorang pendidik haruslah memberikan contoh yang baik, serta dibarengi dengan akar intelektualitas yang mumpuni, agar yang dididik bisa melihat sosok atau “*central figure*” sebagaimana akar katanya, di depan yang berarti, pendidik serasa sebagai seseorang yang mampu memberikan pengetahuan bagi mereka yang dibelakang yakni, murid. Kedua, *Ing madya mangun karsa*, berarti “di tengah” dimaknai, bahwa seorang pendidik yang berpengetahuan memberikan dorongan dan semangat kepada anak didik. Dan ketiga, *Tut wuri handayani*

<sup>1</sup> Plato, *Republik*, ed. Eza Ari Astanto, 1st ed. (Yogyakarta: BASABASI, 2022), 349–50.

<sup>2</sup> Sari Agustiani, Abd Haris, and Rosichin Mansur, “Pendidikan Menurut Perspektif Tokoh Filsuf Barat,” *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 6, no. 2 (2023): 819, <https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i2.4219>.

<sup>3</sup> Agustiani, Haris, and Mansur, “Pendidikan Menurut Perspektif Tokoh Filsuf Barat,” 820.

<sup>4</sup> Tia Basana Hutagalung and Liesna Andriany, “Filosofi Pendidikan Yang Diusung Oleh Ki Hadjar Dewantara Dan Evolusi Pendidikan Di Indonesia,” *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2, no. 3 (2024): 95–96, <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i3.615>.

berarti “*di belakang*” yang berarti, pendidik perlu memberikan motivasi dan arahan. Konsep filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi cikal bakal evolusi pendidikan Indonesia kedepannya memiliki makna dan tujuan yang bagus, dan tentu sesuai harapannya, menciptakan manusia yang merdeka, berarti, setiap masyarakat Indonesia perlu mendapat pendidikan yang layak.

Tetapi seiring waktu berjalan, secara realitasnya, pendidikan Indonesia masih jauh dari kata harapan yang bagus itu sendiri. Mengulik tulisan Efrizal Nasution, Indonesia pernah didapuk sebagai negara yang menjalankan pendidikannya dengan baik, berawal dari cita-cita para *founding fathers* yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “*Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia*” Bukan tanpa alasan, tambahnya, Indonesia pernah dipuji dahulu sebagai negara dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Asia, dan juga pernah di era 1960-an mengirimkan tenaga-tenaga pengajar ke negara tetangga, contohnya adalah Malaysia.<sup>5</sup> Berjalan dengan sangat baik dan fantastis hingga tahun 60-an, kemudian dalam perkembangan selanjutnya, ada tantangan serius dalam pendidikan di Indonesia itu sendiri.

Mengutip dari tulisan Zamhari, Noviani, dan Zainudin, bahwa sistem pendidikan di Indonesia memiliki masalah serius yakni ketidaksetaraan antara pedesaan dan perkotaan. Tambahnya, ketidaksetaraan itulah yang menciptakan kesenjangan sosial, khususnya di bagian pendidikan, terbatasnya akses, dan juga kendala sosial.<sup>6</sup> Inilah yang menghambat kemajuan dalam pendidikan itu sendiri, yang tentu akan berdampak serius bagi generasi selanjutnya. Misalnya dalam riset oleh Muhammad Rafli yang termuat dalam artikel *Goodstats*,<sup>7</sup> “*Pendidikan di Indonesia masih berada di angka-4 di ASEAN, masih kalah jauh dengan Singapura, Thailand, dan Malaysia*” Selain itu, mengutip dari Tulisan Annisa Rahmadanita, permasalahan pendidikan di Indonesia ialah rendahnya literasi. Cakupan dari literasi disini ialah membaca dan menulis, dan untuk era saat ini ialah rendahnya kemelekan generasi muda Indonesia terhadap teknologi dan media.<sup>8</sup> Ini diperkuat oleh Artikel Muhamad Nograhan melalui Detik, Tingkat literasi pendidikan di Indonesia diungkapkan melalui riset *World Population Review* berjudul “*10 Negara Dengan Sistem Pendidikan*

<sup>5</sup> Nasution Efrizal, “Problematika Pendidikan Di Indonesia,” *Mediasi* 8, no. 1 (2018): 1–2.

<sup>6</sup> Zamhari, Dwi Noviani, and Zainuddin, “Perkembangan Pendidikan Di Indonesia,” *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 2–3, <https://doi.org/10.61132/morfologi.v1i5.42>.

<sup>7</sup> Muhammad Rafli, “Indonesia Peringkat 4 Negara Dengan Penduduk Paling Terdidik Di ASEAN,” *Goodstats*, 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-peringkat-4-negara-dengan-penduduk-paling-terdidik-di-asean-pa4k0>.

<sup>8</sup> Annisa Rahmadanita, “Rendahnya Literasi Remaja Di Indonesia: Masalah Dan Solusi,” *Jurnal Pustaka Ilmiah* 8, no. 2 (2022): 56–58, <https://doi.org/10.20961/jpi.v8i2.66437>.

*Terbaik 2025 Versi World Population Review*,” Indonesia berada pada angka 96%, artinya masih cukup rendah untuk ukuran bangsa yang sudah berdiri lama. Baik ketidaksetaraan pendidikan yang tidak merata, ada ketimpangan antara desa dan kota, juga minimnya literasi generasi muda bangsa Indonesia, dari dua inilah sebagai cikal bakal penulis untuk membuat tulisan ini.<sup>9</sup>

Lokus analisis penelitian ini ialah salah satu provinsi di Indonesia, NTT yakni Darurat Literasi. Data yang dipaparkan di bagian hasil penelitian dimana itu menggambarkan ketimpangan pendidikan, dan ini akan menjadi masalah yang dihadapi oleh generasi muda kelak jika tidak ditangani serius. Dari analisis terhadap kondisi tersebutlah penulis akan menggunakan teori Pendidikan dari Paulo Freire, Cukup familiar atau umum teori ini dipakai sebagai pisau analisis terhadap realitas minimnya bahkan dalam posisi darurat literasi di NTT. Melalui teorinya jugalah, penulis bisa membedah apa yang perlu dilakukan pemerintah sebagai penanggung jawab dan yang memastikan bahwa generasi muda Indonesia perlu mendapatkan pendidikan yang layak, setara, dan benar-benar tepat sasaran. Seperti diawal pendahuluan, yang dilontarkan oleh Plato dan Aristoteles, dan Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah harapan, kepastian, tanggung jawab pemerintah, pembinaan generasi sedari dini, dan tentunya ialah kebahagiaan. Selain itu, ini juga menjadi imperatif moral masyarakat, dimana bermakna pemerintah sebagai penjalan kebijakan, dan pembuat ketentuan yang tentunya harus berdampak baik dan dapat diterima kepada masyarakat, khususnya bidang pendidikan. Oleh karena itulah, tulisan ini diberi judul, *Darurat Literasi di NTT dan Pendidikan Ala Paulo Freire Sebagai Imperatif Moral Masyarakat*.

## Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor berpendapat bahwa, penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki maksud agar dapat memperoleh pemahaman yang mendalam berdasarkan fakta atau realitas yang ada.<sup>10</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah studi pustaka, dimana menurut Creswell ialah sebuah pendekatan yang menganalisis berupa sumber-sumber, khususnya buku-buku, literatur, artikel, *website*, dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema

<sup>9</sup> Widhi Koesmawardhani Nograhany, “10 Negara Dengan Sistem Pendidikan Terbaik 2025 Versi World Population Review,” Detik, 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7841602/10-negara-dengan-sistem-pendidikan-terbaik-2025-versi-world-population-review#:~:text=Peringkat Indonesia di Dunia dan,Tenggara ditempati negeri jiran%2C Singapura>.

<sup>10</sup> Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.

penulisan.<sup>11</sup> Penelitian ini berfokus kepada sumber data yaitu baik artikel maupun sejenisnya yang memuat data dampak literasi ini. Kemudian, buku yang dipakai ialah berisi tentang teori, dan tentunya ialah buku Paulo Freire, dan juga artikel jurnal yang membahas serupa.

## Hasil dan Pembahasan

### *Pendidikan Menurut Paulo Freire*

Paulo Freire merupakan salah satu tokoh pendidikan paling berpengaruh di abad ke-20 yang dikenal luas melalui beberapa karya, pandangannya tentang pendidikan. Salah satu karyanya yang paling terkenal dan menarik perhatian dunia yaitu *pedagogy of the oppressed* (Pendidikan Kaum Tertindas).<sup>12</sup> Pengertian pendidikan menurut Freire diawali dengan analisis kata *to teach* (mendidik) dari sudut tata bahasa. Kata *to teach* merupakan kata kerja *transitive-relative*, kata kerja yang membutuhkan objek langsung (sesuatu) dan objek tidak langsung (kepada seseorang). Untuk melalui perspektif ini, arti mendidik adalah mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Lebih lanjut, mendidik adalah lebih dari sekedar kata kerja. Hal ini menjadi jelas bukan saja dari keberangkatan pikirannya, melainkan dari sudut pandang metafisik sebagai pijakannya terhadap proses kognitif. Menurut Freire, secara sederhana, mengartikan mendidik adalah memindahkan merupakan sesuatu yang mustahil dalam konteks belum selesainya sejarah manusia. Dalam sejarah kehidupan, manusia menemukan bahwa dengan proses belajar yang memungkinkan adanya “mendidik”. Untuk itu, secara logika, belajar mendahului mendidik, sedangkan mendidik adalah bagian terkecil dari belajar.<sup>13</sup>

Bagi Freire, pendidikan lebih dari sekedar pelatihan terhadap peserta didik agar mempunyai kompetensi atau skill tertentu, melainkan pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik mengetahui realitas itu dibentuk. Lebih lanjut Freire mengatakan bahwa dasar dari pendidikan adalah hakikat manusia. Manusia menurutnya memiliki ciri khas yang berupa kebebasan. Kebebasan disini diartikan sebagai situasi seseorang yang tidak terhalangi untuk mencapai afirmasi diri sebagai manusia yang bertanggung jawab.<sup>14</sup> Untuk itu, pendidikan yang dibutuhkan adalah pendidikan yang membuat manusia berani membicarakan masalah-masalah lingkungannya dan mengambil dalam

<sup>11</sup> J.W. Creswell, *Qualitatif Inquiry and Research Design*, Sage Publi (California, 1998), 41.

<sup>12</sup> Zainal Abidin, *Paulo Freire: Pedagogi Kritis Dan Penguatan Civil Society Di Indonesia* (Yogyakarta: DIVA Press, 2022), 10.

<sup>13</sup> Abidin, 40.

<sup>14</sup> Abidin, 61.

lingkungan tersebut; pendidikan yang mampu mengingatkan manusia akan bahaya-bahaya zaman dan memberikan kekuatan yang menghadapi bahaya-bahaya zaman, bukan pendidikan yang menjadikan akal manusia tunduk dan paseah kepada keputusan-keputusan orang lain. Disini, Freire ingin agar pendidikan melahirkan manusia yang berpartisipasi secara aktif dalam perubahan dan penciptaan realitas.<sup>15</sup> Dalam hal ini, Freire melihat pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses pendidikan yang menuntun manusia untuk menjadi subjek aktif dalam mengubah dunia.

Freire melihat kebanyakan praktik pendidikan bertujuan untuk mereproduksi ideologi kelas dominan dan kondisi-kondisi untuk memelihara kekuasaan mereka. Tujuan pendidikan ini umumnya digunakan oleh kelas penguasa. Disini Freire mengusulkan agar pendidikan dijadikan sebagai sarana reproduksi ideologi tandingan. Artinya bahwa harus ada dialektik antara pendidikan sebagai reproduksi ideologi dominan dan reproduksi ideologi tandingan. Ideologi tandingan adalah ruang yang digunakan untuk melawan ideologi yang dominan.<sup>16</sup>

### Pendidikan sebagai Pembebasan

Menurut Freire, pendidikan yang membebaskan adalah proses dimana pendidik bersama-sama dengan peserta didik berupaya untuk mengenal dan mengungkapkan kehidupan yang nyata secara kritis. Pendidikan harus berupaya memberikan bantuan serta menyediakan perangkat untuk membebaskan seseorang di dalam kehidupan nyata dari bentuk penindasan yang mencekik mereka.<sup>17</sup> Artinya bahwa pendidikan tidak boleh menjadi alat untuk menentukan, melainkan harus membuka ruang bagi peserta didik untuk menyadari dirinya, lingkungannya, dan struktur sosial yang membelenggu mereka. Melalui proses ini, peserta didik mampu mengenali apa yang menindas mereka, serta mengetahui apa yang mendasari kebebasan mereka, sehingga pendidikan pendidikan dipraktikkan sebagai sarana transformasi sosial, bukan sekedar reproduksi pengetahuan yang melestarikan status quo. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Muhammad Husni, bahwa transformasi sosial yang dimaksud ialah pendidikan pembebasan yang terbebas dari berbagai hal-hal yang mengekang kemanusiaannya (*humanity/humanities*) menuju ke kehidupan yang penuh dengan kebebasan. Artinya, Freire menginginkan pendidikan semacam ini benar-benar diterapkan sebagaimana yang dijelaskan dalam tujuannya yakni pendidikan yang

---

<sup>15</sup> Abidin, 62.

<sup>16</sup> Abidin, 63.

<sup>17</sup> Abidin, 64.

libertarian. Husni juga menambahkan, baik guru atau murid sama-sama berperan aktif serta bebas, dan hubungan relasionalnya haruslah subyektif.<sup>18</sup>

### Dialog sebagai Jantung Pendidikan

Dialog sebagai pusat dalam pemikiran Freire. Bagi Freire, dialog tidak hanya sebatas percakapan biasa, tetapi perjumpaan manusia dalam cinta, kerendahan hati, dan kepercayaan. Untuk itu, dialog menjadi sarana dalam menemukan kebenaran bersama. Jika dialog ditiadakan, pendidikan hanya menjadi mololog yang bersifat indoktrinatif.<sup>19</sup> Dalam praktek pendidikan kerap kali guru tidak memaksa untuk memaksakan, hal ini yang mestinya dirubah dalam prakteknya. Seharusnya guru membuka ruang bagi murid untuk menyuarakan pengalaman, aspirasi, pengetahuan yang mereka miliki. Proses ini memungkinkan munculnya apa yang disebut Freire sebagai kesadaran kritis. Lebih lanjut, melalui pendidikan yang dialogis, menumbuhkan rasa saling menghargai, memberdayakan, dan memerdekakan. Dalam pandangannya juga, Freire menganggap konsep Dialog ini terdapat dua dimensi yaitu, refleksi dan tindakan, dan juga Dialog dalam konsepsi Freire ialah mengantarkan setiap individu untuk terlibat dengan dunia atau tantangan-tantangan yang dihadapinya. Meski demikian, Freire dalam Dialog ini haruslah ditopang oleh beberapa hal, seperti yang dituliskan Asep Sudrajat dan Hambali, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Adanya rasa cinta yang bisa melahirkan tindakan pembebasan. Cinta menjadi basis yang sah. Bukan hanya sekedar mencintai dunia, melainkan mencintai alam
- b. Perlunya ada kerendahan hati. Ini penting, sebagai wujud manusia yang adalah makhluk yang terus untuk berkembang, inilah yang dinamakan kerendahan hati itu karena selalu untuk belajar lebih dari apa yang harus diketahui
- c. Adanya keyakinan relasional antar manusia, sehingga harus ditopang oleh rasa yang dan juga cinta.

### Pendidikan "Gaya Bank"

Freire menjelaskan konsep pendidikan gaya bank sebagai ***"bentuk pendidikan yang menempatkan guru sebagai subjek yang serba tahu dan murid hanya sebagai objek pasif yang menerima."*** Jenis pendidikan ini

<sup>18</sup> Muhammad Husni, "Memahami Pemikiran Karya Paulo Freire 'Pendidikan Kaum Tertindas' Kebebasan Dalam Berpikir," *Al-Ibrah* 5, no. 2 (2020): 51–52, <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/103>.

<sup>19</sup> Husni, 72–75.

<sup>20</sup> Asep Sudrajat Ajat and R. Yuli Akhmad Hambali, "Analisis Filsafat Paulo Freire Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia," *Jurnal Perspektif* 5, no. 1 (2021): 28, <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.107>.

diartikan sebagai proses menabung, dimana guru bertindak sebagai penabung pengetahuan sementara murid adalah celengan yang hanya diisi, dicatat, dan menyimpan informasi tanpa diberi kesempatan untuk mengolah atau mengkritisnya. Pengetahuan dalam sistem ini bukan hasil pencarian bersama, melainkan hadiah sepihak dari mereka yang merasa tahu kepada mereka yang dianggap bodoh. Akibatnya, murid kehilangan daya cipta, daya ubah, dan kekuatan berpikir kritis, sehingga pendidikan berubah menjadi alat penjinakan yang memelihara struktur dipelihara. Dalam hal ini, bank gaya pendidikan menolak dialog sejati, menghindari komunikasi, dan hanya menekankan hafalan serta penyesuaian murid terhadap dunia apa adanya, bukan untuk memodifikasi. Hal ini membuat manusia teralienasi dari proses kemanusiaannya sendiri dan menghambat mereka menjadi subjek yang aktif dalam sejarah. Bagi Freire, gaya bank adalah pendidikan yang bersifat dehumanisasi karena melanggengkan ketidakadilan sosial dan mematikan kesadaran kritis manusia.<sup>21</sup>

### ***Darurat Literasi di NTT***

Darurat literasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), akhir-akhir ini hangat diperbincangkan di berbagai platform media sosial, baik oleh kalangan akademisi, jurnalis, maupun masyarakat. Menurut informasi dari beberapa media menyampaikan persoalan literasi di NTT memasuki fase darurat. Andriko selaku pejabat gubernur di NTT, menjelaskan bahwa lebih dari 1 juta peserta didik yang tersebar di 14.000 satuan pendidikan di seluruh wilayah NTT, tantangan terbesar adalah tingginya angka anak-anak yang tidak sekolah mencapai lebih dari 130 ribu anak. Bahkan, lebih mengkhawatirkan dari fenomena ini adalah masih banyak siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa di NTT yang mengalami kesulitan membaca. Hal ini terbukti pada lampiran data Asesmen Nasional 2023 menunjukkan hanya sekitar 22% satuan pendidikan di NTT yang mencapai literasi minimal.<sup>22</sup>

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan bahwa terdapat siswa di NTT yang memiliki kemampuan membaca dan menulisnya tidak baik-baik saja. Sekolah-sekolah di beberapa kabupaten ditemukan sejumlah siswa SMA hanya mampu mengeja perkata ketika membaca teks yang panjang, dan juga kesulitan memahami makna dari teks tersebut.<sup>23</sup> Seperti

<sup>21</sup> Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, 1st ed. (Jakarta: PT. Temprint, 1985), 51–58.

<sup>22</sup> Kemdikbud, "Pendidikan Berkualitas Untuk Semua Komitmen," BPMPNTT Kemdikbud, 2024, <https://bpmpntt.kemdikbud.go.id/utama-slider/pendidikan-berkualitas-untuk-semua-komitmen-kemendikdasmen-di-ntt-05-desember-2024-back/>, diakses pada tanggal 29 September 2025.

<sup>23</sup> Naya Kia, "Darurat Literasi Di NTT," Suara Kupang FM, 2025, <https://suarakupangfm.com/?s=Darurat+Literasi+di+NTT>.

yang disoroti dalam laporan media *Kompas* bahwa indeks literasi di NTT masih rendah. Untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) tahun 2024, pada kategori baik hanya 24,7% sekolah, kategori sedang 25,80%, kategori kurang 25,36%, dan kategori paling rendah dari semua kategori 24,15%. Untuk indeks kategori baik hanya 15,81%, kategori sedang 33,81%, kategori kurang 26,23%, dan kategori paling rendah dari semua kategori itu sebesar 24,15%.<sup>24</sup> Hal ini memberi kesimpulan mengenai masalah literasi di bukan sekedar kekurangan fasilitas, meskipun keterbatasan fasilitas sangat mempengaruhi tetapi juga terkait dengan aspek budaya, kebiasaan membaca, dukungan keluarga, dan kapasitas guru.

Sebagaimana ditekankan oleh Polikarpus sebagai ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) NTT bahwa masalah ini bukan sekedar kekurangan keterampilan dasar, melainkan akar dari tantangan struktural yang lebih luas. Menurut penilaian Polikarpus, dalam menghadapi fenomena ini peran guru dan kepala sekolah sangat penting dalam membangun budaya literasi di sekolah. Selain itu, perpustakaan harus ditempatkan di posisi strategis agar mudah diakses siswa maupun orang tua. Lebih lanjut, Ia menegaskan pentingnya para dosen di perguruan tinggi untuk mendorong mahasiswa untuk rajin membaca.<sup>25</sup>

Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam membangun dasar kemampuan literasi di jejang sekolah dasar. Rendahnya kemampuan membaca dan menulis bukan hanya persoalan akademis, melainkan persoalan masa depan generasi muda NTT.<sup>26</sup> Menurut informasi dari salah satu media bahwa terdapat sejumlah faktor yang memperparah krisis ini, antara lain; Minimnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan, koleksi buku bermutu dan ruang baca yang layak, akses pendidikan yang sulit akibat kondisi geografis kepulauan dan infrastruktur yang terbatas, kurangnya keteladanan dari pendidik maupun masyarakat dalam menumbuhkan budaya membaca, Lemahnya keseriusan pemerintah dalam menjalankan program literasi yang berkelanjutan.<sup>27</sup>

Fenomena ini berdampak luas terhadap masa depan NTT terkhususnya. Dari sisi akademis, siswa dengan literasi yang lemah cenderung tertinggal

---

<sup>24</sup> Frans Pati Herin, "Darurat Literasi Di NTT, Ada Mahasiswa Tak Cakap Membaca," *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/darurat-literasi-di-ntt-ada-mahasiswa-tak-cakap-membaca>.

<sup>25</sup> Kristiana Sawo Senda, "FTBM NTT Tekankan Darurat Literasi Pelajar Dan Mahasiswa," *RRI*, 2025, <https://rri.co.id/Daerah/1847212/Ftbn-Ntt-Tekankan-Darurat-Literasi-Pelajar-Dan-Mahasiswa>.

<sup>26</sup> Logan Liwers, "Krisis Literasi Di NTT: Masa Depan Generasi Yang Terancam," *Kompasiana*, 2025, <https://www.kompasiana.com/martoseran7087/68d08229c925c46b5b59ba74/krisis-literasi-di-ntt-masa-depan-generasi-yang-terancam>.

<sup>27</sup> Liwers.

dalam setiap mata pelajaran yang diharuskan untuk memahami bacaan. Kemudian, kurangnya pemahaman soal dan informasi menjadi salah satu penghambat bagi prestasi akademik siswa. Di sisi lain, generasi muda NTT yang memiliki literasi yang rendah akan sulit bersaing dalam era perkembangan teknologi informasi saat ini, dan kerap kali rentan terhadap disinformasi dan hoaks, serta kurang kompetitif dalam dunia kerja maupun pendidikan lanjut, yang akan berdampak pada resiko kemiskinan struktural.<sup>28</sup>

### ***Pemerintah Sebagai Representasi Imperatif Moral Masyarakat***

Berbicara tentang moral, apalagi dalam kategoris yang luas yaitu masyarakat pastinya adanya sesuatu dan tujuan kenapa harus itu dijalankan. Dalam pandangan Kant sendiri, Moral ialah sebuah karya besar, ini dimaknai sebagai perbincangan tentang pemikiran manusia. Moral juga dijelaskan sebagai pelaksana atas keteraturan-keteraturan yang ada di dalam semesta ini, sehingga, hukum moral itu bisa mengatur yang sudah teratur sebelumnya, dan tidak dikacaubalaukan oleh hal apapun itu. Dalam tulisan Endang Daruni Asdi, Imperatif kategoris Kant sebagai dasar Moral dinilai efektif dan juga bisa menemukan masalah-masalah yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan manusia, karena ini bisa dijalankan sebagai solusi untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau pendidikan sebagai salah satu wadah sah penampung serta representatif ilmu pengetahuan.<sup>29</sup> Selain itu, ia juga mengutip salah satu pemikiran Kant yang dibahasakannya secara sederhana, demikian bunyinya,<sup>30</sup> ***"Hukum Moral itu mengikat semua manusia tanpa memandang nasionalitas dan agama"*** Artinya, moral yang dimaksudkan Kant ialah sebagai pengatur keteraturan agar tidak berbelok, bahkan dibengkokkan dari bentuk yang semestinya. Jika dibawa dalam kehidupan Indonesia sendiri, pemahaman Moral Kant dirasa relevan digunakan sebagai kaca mata untuk melihat apa yang dirasa kurang dari implementasi hukum-hukum dalam bentuk kebijakan maupun undang-undang yang membidangi kehidupan masyarakat di Indonesia, juga apakah ini tepat sasaran atau tidak. Pancasila sebagai *philosophie grondslag* adalah salah satu gambaran nyata bagaimana Moral dijadikan sebagai dasar falsafah, serta *shaping idea* untuk masa depan yang baik di negara Indonesia ini. Sila-sila Pancasila, baik satu sampai lima semuanya menggambarkan Moralitas yang

<sup>28</sup> Liwers.

<sup>29</sup> Endang Asdi Daruni, "Imperatif Kategoris Dalam Filsafat Moral Immanuel Kant," *Jurnal Filsafat*, no. 23 (1995): 10.

<sup>30</sup> Asdi Daruni, 15.

khas di Indonesia, berisikan tentang spiritualitas, keadilan, kemanusiaan, kesatuan/ *unity*, dan permusyawaratan.

Secara umumnya yang diketahui, pemerintah adalah sebagai penjalan kebijakan-kebijakan yang sudah disusun, dimusyawarahkan, dan pada akhirnya disahkan. Dalam tata negara sendiri, terbagi menjadi tiga: Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Ini yang biasanya dikenal sebagai *trias politica*, semuanya berperan masing-masing pada bidangnya, baik pembuat undang-undang, penguji undang-undang, dan pensah undang-undang. Diharapkan dari yang dibuat itu bisa secara maksimal dijalankan secara nyata dan baik bagi masyarakat. Selaras dengan Tokan Pureklolon, politik yang berkaitan dengan tata cara pemerintahan itu didasarkan pada tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi antar perorangan. Adanya interaksi pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan, apa yang menjadi keinginan mereka, dan semuanya didasarkan pada kemaslahatan kebaikan bagi masyarakat itu sendiri. Ia menegaskan, politik adalah hal-hal yang membicarakan serta terkait dengan negara, yakni pemerintah, baik kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi alokasi sumber daya.<sup>31</sup> Pemerintah dibekali dengan itu semua, sehingga pasti, kebijakan bisa dijalankan dengan baik bila semuanya memiliki moral, khususnya di Indonesia, berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Inilah yang dimaksud sebagai imperatif moral, artinya kebijakan-kebijakan yang dijalankan haruslah berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, baik primer dan sekunder ataupun papan dan sandang. Tetapi juga berbagai macam bidang-bidang yang lain, baik sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dan itu semua harus berkelanjutan dan jangka panjang.

### ***Peran Pemerintah Dalam Pasang Surut Sistem Pendidikan Indonesia***

Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memiliki ruang dan lingkup untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Nurjanah mengatakan, Pembukaan UUD 1945 sudah menjelaskan bahwa, negara harus dan wajib mencerdaskan kehidupan bangsa dengan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Artinya disini, bidang pendidikan adalah harga mati yang harus dibayar dan akan selalu berlanjut kedepannya melalui kebajikan.<sup>32</sup> Pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral atas bidang dan aspek pembangunan yang diharapkan membuat sebuah negara tersebut maju.

<sup>31</sup> Thomas Tokan Pureklolon, "PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DAN HUKUM NEGARA INDONESIA," *Law Review* 20, no. 1 (2020): 78–79.

<sup>32</sup> SITI NURJANAH, "Human Capital Dan Peranan Pemerintah Dalam Pendidikan," *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan* 12, no. 1 (2014): 88, <https://doi.org/10.21009/econosains.0121.04>.

Pendidikan di Indonesia dilandasi oleh dasar filosofis serta historikal yang diharapkan bisa membangun negara, membentuk karakter, dan berdaya saing maju.

Ungkapan ini disampaikan oleh Laurensius Dihe Sanga dan Yvonne Wangdra melalui seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi di Universitas Putera Batam pada tahun 2023 memaparkan topik tentang Perannya Pendidikan sebagai Faktor Penentu Daya Saing Bangsa. Menurutnya, Kriteria dan juga indikator daya saing bangsa adalah Pendidikan. Selain itu pungkasnya, mengutip yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 menjelaskan, Fungsi Pendidikan adalah menempah kemampuan, membentuk *skill and character*, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari situlah, penempatan, pengajaran, dan pembentukan melalui bidang pendidikan akan menumbuhkan nilai kemandirian dan juga melestarikan budaya bangsa. Ada beberapa yang dituangkan dalam analisisnya, antara lain:<sup>33</sup>

- a. Fungsi Pendidikan ialah untuk mengubah dan memajukan sebuah bangsa, khususnya kehidupan. Mengambil dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ialah untuk menumbuhkembangkan rasio dan karakter, serta memerdekakan setiap manusia. Ini adalah sebagai tanggung jawab personal setiap manusia untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi manusia berkarakter, kreatif, berakhlak mulia, dan demokratis. Hal inilah diharapkan dapat berfungsi sebagai tonggak kemajuan dan menentukan daya saing bangsa Indonesia
- b. Kriteria Pendidikan di Indonesia ditentukan oleh kualitas pendidik, misalnya di sekolah adalah guru, dan di kampus atau universitas adalah dosen. Selain itu, infrastruktur pendidikan haruslah memadai dan mendukung. Jika tidak memadai dan mendukung maka ini akan berdampak buruk bagi kemajuan bangsa.

Dari sini sudah bisa dilihat bagaimana vitalnya pemerintah sebagai pemangku jabatan dan pelaksana kebijakan terhadap masa depan bangsa Indonesia itu sendiri, khususnya di bagian pendidikan. Pada realitanya bisa terlihat, pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata harapan, masih tertinggal, dan cenderung melambat. Banyak faktor-faktornya, secara garis besarnya ialah faktor sumber daya manusia dan kebijakan yang tidak tepat sasaran, dari situlah tercipta ketimpangan sosial dan juga ketidakmerataan pendidikan yang seharusnya semua anak-anak atau generasi muda bangsa bisa menikmatinya. Nurjanah menegaskan, pemerintah memegang peranan

<sup>33</sup> Y. Sanga, L. D., & Wangdra, "Pendidikan Adalah Faktor Penentu Daya Saing Bangsa Laurensius," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (Snistek)* 5, no. September (2023): 84–86.

penting dalam peningkatan kualitas pendidikan, baik ketersediaan sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendidikan yang layak.

Selain itu, kurikulum juga menjadi permasalahan sebagaimana gambar surutnya kemajuan pendidikan di Indonesia yang didasarkan pada pergantian pemerintahan atau rezim. Tambahnya, generasi muda bangsalah yang menjadi korbannya. Dari situlah, pemerintah memegang peranan penting dalam pertarungan sistem pendidikan di Indonesia, baik maju atau mundur, surut atau naik, semua bisa dilihat dari kebijakan, kualitas pelaksanaan, dan tepat sasaran atau tidaknya.<sup>34</sup>

### ***Analisis Pendidikan Menurut Paulo Freire terhadap Darurat Literasi di NTT***

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa darurat literasi di NTT menunjukkan wajah buruk sistem pendidikan Indonesia di wilayah tertinggal dengan tingginya angka anak yang tidak sekolah, rendahnya keterampilan membaca dan menulis, serta lemahnya budaya literasi masyarakat. Hal ini kemudian diperburuk oleh faktor struktural diantaranya; kemiskinan, keterbatasan infrastruktur pendidikan, ketimpangan geografis, serta minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Ini adalah gambaran bagaimana masih belum jalannya kebijakan yang menysasar pada usaha untuk mengembangkan pendidikan kearah yang lebih baik lagi, selain itu juga faktor-faktor lain juga ikut menyebabkan ini terjadi. Artinya, ini adalah dalam kondisi darurat untuk pendidikan di Indonesia, khususnya di NTT sebagai bagian dari ibu Pertiwi. Melihat dari situasi dariurat literasi di NTT gagasan Freire sangat relevan, sebagai titik berangkat untuk memahami fenomena ini. Freire menekankan bahwa pendidikan sejatinya sebagai proses dialogis yang memerdekakan, bukan semata aktivitas transfer pengetahuan. Baginya, literasi bukan hanya kemampuan membaca huruf tetapi kemampuan membaca dunia.<sup>35</sup> Sehingga, literasi dalam konteks ini harus dipahami sebagai upaya membangun kesadaran kritis. Melalui kesadaran kritis, dapat membuka ruang partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan sebuah model pendidikan yang memadukan refleksi dan aksi (praktis) untuk mengatasi ketimpangan ketidakadilan struktur. Hal ini memungkinkan seseorang berjuang untuk menjadi manusia seutuhnya, dan bahwa refleksi serta tindakan merupakan kewajiban. Sebagaimana yang ditekankan oleh Freire bahwa tindakan tanpa refleksi hanya menjadi aktivitas

<sup>34</sup> NURJANA, "Human Capital Dan Peranan Pemerintah Dalam Pendidikan."

<sup>35</sup> Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, 62–64.

murni, sedangkan refleksi tanpa aksi akan jatuh kedalam verbalisme.<sup>36</sup> Selain itu, pendidikan yang membebaskan dari Paulo Freire juga menerapkan model pembelajaran yang didasari oleh harapan serta mengembangkan kreatifitas murid sebagai bentuk memanusiaikan manusia itu sendiri. Ini juga penting karena selain melakukan pembebasan melalui pengajaran, juga adanya rasa cinta itu sendiri.

Pendidikan gaya bank adalah salah satu model yang dikritik oleh Freire, dimana guru bertindak sebagai penyimpan pengetahuan dan siswa sebagai penerima pasif.<sup>37</sup> Praktik ini kerap kali terlihat dalam penerapan di sebagian besar institusi pendidikan di NTT. Hal ini terlihat pada metode pengajaran yang berorientasi pada hafalan, minimnya ruang dialog serta keterbatasan kompetensi pengajar yang mampu merangsang daya kritis murid. Jika dikaitkan gaya pendidikan ini dengan konteks NTT, tentu sebagai alasan mendasar yang memperparah minat baca, dan lemahnya kemampuan berpikir reflektif, karena karena murid tidak dilatih untuk membaca dengan kesadaran kritis, melainkan sekedar membaca untuk menghafal. Hal inilah yang mengakibatkan daruratnya literasi di Indonesia, melihat dari pengajaran yang dilakukan, juga adanya potensi penindasan atau lebih tepatnya pendidikan menindas yang dilakukan karena keterbatasan sarana-prasarana, kompetensi pendidik yang meragukan, serta ruang belajar yang cenderung tidak dialogis, melainkan monologis. Di tengah era Globalisasi ini, murid perlu dibekali dengan literasi yang kuat, dikomparasikan dengan penglihatan yang diberikan kepada dunia.

Dalam kerangka Freire, literasi kritis menuntut seseorang untuk berinteraksi secara dialogis dengan teks dan konteks.<sup>38</sup> Artinya bahwa murid tidak hanya belajar memahami bacaan, tetapi juga memahaminya dengan kondisi sosial yang mereka hadapi. Proses dialog itu lahir dari masalah yang dekat dengan konteks kehidupan mereka. Dari dialog ini, mereka tidak hanya mengembangkan kemampuan literasi, tetapi juga membangun kesadaran kritis atas sosial yang dihidupi. Tetapi jika dilihat dari salah satu faktor pemicu fenomena ini yaitu rendahnya ketersediaan bahan bacaan. Padahal pada penekanannya Freire menempatkan teks sebagai pemicu dialog kritis, tetapi pada kenyataannya, banyak sekolah di NTT masih kekurangan buku, bahkan untuk kebutuhan dasar. Untuk itu, peran guru harus sebagai fasilitator yang mampu memancing pertanyaan, membuka ruang refleksi, dan membimbing murid menuju kesadaran kritis. Pada bagian ini, kompetensi guru harus

---

<sup>36</sup> Freire, 44.

<sup>37</sup> Freire, 50–53.

<sup>38</sup> Freire, 97–98.

memadai. Ini juga ditegaskan oleh Husni melalui tulisannya, bahwa tugas pendidik atau guru harus pada taraf progresif revolusioner, dibekali dengan kompetensi yang layak dan bekal pengetahuan yang memadai, diharapkan adanya penambahan intelektualitas dan transformasi cara berpikir murid yang kritis dan inovatif, serta merdeka.<sup>39</sup>

### ***Analisis Imperatif Moral Masyarakat Terhadap Darurat Literasi di NTT dan Pendidikan Menurut Freire***

Dari analisis sebelumnya, terlihat jelas adanya faktor-faktor yang mengakibatkan Darurat Literasi di NTT. Gagasan Freire juga dirasa bisa membaca lebih jelas melalui analisisnya terhadap situasi. Bisa dilihat, kurikulum pendidikan di Indonesia masih belum berjalan semestinya di jalan atau arah yang benar diakibatkan oleh kompetensi pendidik yang belum memadai serta metode pengajaran yang dirasa masih belum bisa memerdekakan generasi muda di NTT, khususnya anak-anak murid. Ditambah lagi dengan sarana-prasarana, ketidakmerataan pendidikan, suplai yang tidak tercapai di daerah tersebut mengakibatkan hal ini terjadi, sehingga ini adalah masalah serius yang harus dihadapi bersama. Pemerintah sebagai pemilik kebijakan, dan kekuasaan tidak maksimal untuk mengembangkan Pendidikan di Indonesia, hal ini tidak bisa dibantah melihat data dan sumber yang dipakai penulis dimana secara jelas bisa disimpulkan adanya kehambatan dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia, dan dampaknya ada di NTT. Kebijakan pendidikan adalah bagian dari Imperatif Moral yang dilakukan oleh Pemerintah, baik daerah dan pusat, memastikan tidak ada generasi muda yang tidak bisa baca, menulis, dan tidak melek informasi. Ini perlu didukung oleh yang disampaikan tadi sebelum-sebelumnya, infrastruktur yang menunjang, sarana-prasarana pendidikan yang memadai, dan kompetensi pendidik menjadi evaluatif kedepannya. Kebijakan harus tetap dijalankan, sebagaimana yang sesuai dengan cita-cita para pendahulu bangsa yakni Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Inilah Imperatif Moral yang perlu untuk dijalankan. Selain itu, masyarakat juga harus melihat dan menyadari bahwa, pendidikan sangat perlu untuk dijalankan secara dini, bukan hanya kategoris formal, melainkan informal.

Seperti yang dikatakan oleh orang bijak, *pendidikan yang tertua adalah keluarga*. Baik pemerintah sebagai pemangku kebijakan, masyarakat juga haruslah memiliki moral yang imperatif itu, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan memberikan edukasi sedini mungkin kepada anak-

<sup>39</sup> Husni, "Memahami Pemikiran Karya Paulo Freire 'Pendidikan Kaum Tertindas' Kebebasan Dalam Berpikir," 58.

anaknyanya. Agar kelak, pendidikan yang diterapkan dengan dua aspek akan jauh bisa lebih membentuk generasi muda yang berkarakter, tidak bisa disepelkan. Ini diperkuat oleh tulisan Annisa, bahwa, baik regulator yakni pemerintah yang menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mendukung meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia, juga masyarakat yang melaksanakan bisa bersama-sama bersinergi dalam membangun dan melakukan edukasi sedini mungkin, baik dalam lingkup keluarga, lingkup antar kampung, dan juga lingkup yang lebih luas, misalnya membentuk komunitas-komunitas yang bercirikan edukasi.<sup>40</sup>

Artinya disini, minimnya darurat literasi di NTT merupakan gambaran untuk menggerakkan moral masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki, mengevaluasi, dan mengembangkan pendidikan kearah yang lebih baik lagi, baik pemerintah dan juga masyarakat secara imperatif. Kebijakan yang berkualitas ditambah kesadaran masyarakat dinilai bisa secara efektif, bila dijalankan dengan serius. Pendidikan Freire merupakan alat untuk melihat seperti apa itu pendidikan yang pedagogis atau membebaskan. Itu bermakna, generasi muda di NTT perlu mendapatkan pendidikan bukan hanya pada strata sekedar membaca dan menulis, atau bahasanya ialah *monolog* melainkan *dialog*. Minimnya Darurat Literasi ini juga bisa diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengedukasi anak-anaknya, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, sehingga generasi mudalah yang menjadi korbannya. Sinergitas inilah adalah gambaran imperatif moral, sebagai mana yang dikatakan Kant, Moralitas tidak memandang siapa-siapa baik nasionalisme dan juga agama.

## Kesimpulan

Melalui tulisan ini, penulis sampai pada sebuah kesimpulan bahwa, darurat literasi di NTT merupakan sebuah cerminan kegagalan sistem pendidikan nasional yang belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Dari analisa penulis menurut teori Freire bahwa krisis literasi bukan sekedar persoalan kemampuan membaca dan menulis, melainkan akan berdampak pada masalah kesadaran kritis manusia terhadap realitas sosialnya jika hal ini terus dibiarkan. Untuk itu, gagasan Freire relevan pada bagian ini, sebagaimana dikatakan, jantung pendidikan adalah dialogis bukan monologis sehingga sasarannya tepat pada kesadaran dan aksi transformatif. Lebih lanjut, pemerintah sebagai representatif imperatif moral masyarakat memiliki tanggung jawab etis secara konstitusional untuk menjamin semua orang memperoleh pendidikan yang

---

<sup>40</sup> Rahmadanita, "Rendahnya Literasi Remaja Di Indonesia: Masalah Dan Solusi," 60.

layak dan membebaskan dan juga masyarakat itu sendiri haruslah memiliki kesadaran terhadap kondisi ini karena sebagaimana supaya imperatif moral bisa berjalan, baik pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga masyarakat sebagai yang melaksanakan, semuanya memiliki peran yang sama yakni memajukan pendidikan di Indonesia, serta berjalan dengan baik kedepannya.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. *Paulo Freire: Pedagogi Kritis Dan Penguatan Civil Society Di Indonesia*. Yogyakarta: DIVA Press, 2022.
- Agustiani, Sari, Abd Haris, and Rosichin Mansur. "Pendidikan Menurut Perspektif Tokoh Filsuf Barat." *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 6, no. 2 (2023): 816–23. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i2.4219>.
- Ajat, Asep Sudrajat, and R. Yuli Akhmad Hambali. "Analisis Filsafat Paulo Freire Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia." *Jurnal Perspektif* 5, no. 1 (2021): 14. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.107>.
- Asdi Daruni, Endang. "Imperatif Kategoris Dalam Filsafat Moral Immanuel Kant." *Jurnal Filsafat*, no. 23 (1995): 9–19.
- Basrowi, and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Creswell, J.W. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publi. California, 1998.
- Efrizal, Nasution. "Problematika Pendidikan Di Indonesia." *Mediasi* 8, no. 1 (2018): 1–10.
- Freire, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*. 1st ed. Jakarta: PT. Temprint, 1985.
- Herin, Frans Pati. "Darurat Literasi Di NTT, Ada Mahasiswa Tak Cakap Membaca." Kompas, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/darurat-literasi-di-ntt-ada-mahasiswa-tak-cakap-membaca>.
- Husni, Muhammad. "Memahami Pemikiran Karya Paulo Freire 'Pendidikan Kaum Tertindas' Kebebasan Dalam Berpikir." *Al-Ibrah* 5, no. 2 (2020): 41–60. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/103>.
- Kemdikbud. "Pendidikan Berkualitas Untuk Semua Komitmen." BPPMNTT Kemdikbud, 2024. <https://bpmpntt.kemdikbud.go.id/utama-slider/pendidikan-berkualitas-untuk-semua-komitmen-kemendikdasmen-di-ntt-05-desember-2024-back/>, diakses pada tanggal 29 September 2025.
- Kia, Naya. "Darurat Literasi Di NTT." Suara Kupang FM, 2025. <https://suarakupangfm.com/?s=Darurat+Literasi+di+NTT>.
- Liwiers, Logan. "Krisis Literasi Di NTT: Masa Depan Generasi Yang Terancam." Kompasiana, 2025. <https://www.kompasiana.com/martoseran7087/68d08229c925c46b5b59ba74/krisis-literasi-di-ntt-masa-depan-generasi-yang-terancam>.
- Nograhany, Widhi Koesmawardhani. "10 Negara Dengan Sistem Pendidikan Terbaik 2025 Versi World Population Review." Detik, 2025. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7841602/10-negara-dengan-sistem-pendidikan-terbaik-2025-versi-world-population-review#:~:text=Peringkat Indonesia di Dunia dan,Tenggara ditempati negeri jiran%2C Singapura>.
- NURJANA, SITI. "Human Capital Dan Peranan Pemerintah Dalam Pendidikan." *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan* 12, no. 1 (2014): 83–90. <https://doi.org/10.21009/econosains.0121.04>.
- Plato. *Republik*. Edited by Eza Ari Astanto. 1st ed. Yogyakarta: BASABASI, 2022.

- Pureklolon, Thomas Tokan. "PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DAN HUKUM NEGARA INDONESIA." *Law Review* 20, no. 1 (2020): 71–86.
- Rafli, Muhammad. "Indonesia Peringkat 4 Negara Dengan Penduduk Paling Terdidik Di ASEAN." Goodstats, 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-peringkat-4-negara-dengan-penduduk-paling-terdidik-di-asean-pa4k0>.
- Rahmadanita, Annisa. "Rendahnya Literasi Remaja Di Indonesia: Masalah Dan Solusi." *Jurnal Pustaka Ilmiah* 8, no. 2 (2022): 55. <https://doi.org/10.20961/jpi.v8i2.66437>.
- Sanga, L. D., & Wangdra, Y. "Pendidikan Adalah Faktor Penentu Daya Saing Bangsa Laurensius." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (Snistek)* 5, no. September (2023): 84.
- Senda, Kristiana Sawo. "FTBM NTT Tekankan Darurat Literasi Pelajar Dan Mahasiswa." RRI, 2025. <https://rri.co.id/Daerah/1847212/Ftbm-Ntt-Tekankan-Darurat-Literasi-Pelajar-Dan-Mahasiswa>.
- Tia Basana Hutagalung, and Liesna Andriany. "Filosofi Pendidikan Yang Diusung Oleh Ki Hadjar Dewantara Dan Evolusi Pendidikan Di Indonesia." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2, no. 3 (2024): 91–99. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i3.615>.
- Zamhari, Dwi Noviani, and Zainuddin. "Perkembangan Pendidikan Di Indonesia." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 01–10. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v1i5.42>.